

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesi*, Jakarta: UI-Press
- A.A Navis, 2009. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers
- Beni Kurnia Illahi, 2015, *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, *Skripsi*, Padang
- Binsar Situmorang, 2007, *Dimensi Administrasi dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil*, *Jurnal*, Bandung
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- HAW Widjaya, 2000, *Pemerintahan Desa Marga (Suatu Telaah Administrasi Negara)*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada
- Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Baruntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Perss
- L.J Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung :PT. Revika
- LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang
- LKKAM, 2007 *Pelajaran Adat Minangkabau*. Bandung
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Miriam Budihardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Moch Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press
- Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia

Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*. Jakarta : Bima Aksara

Musyair Zainuddin.2010.*Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal-Usul Adat*, Jogjakarta: Ombak

Ridwan. HR,2007, *Hukum Administrasi Negara*,Jakarta : Raja Grafindo Persada

Siswanto Sunarno.2014, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Sri Hartini dkk.2010, *Hukum Kepegawaian Indonesia*: Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan PerUndang-Undangan

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

